

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu wilayah selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan berlangsungnya aktivitas pembangunan di dalamnya. Pembangunan merupakan faktor penting untuk mendorong kemajuan suatu wilayah, terutama dalam hal infrastruktur, aspek sosial, dan ekonomi, dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan wilayah merupakan upaya sistematis untuk membangun dan mengembangkan suatu wilayah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi, dan infrastruktur fisik yang ada secara efisien, optimal, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menciptakan wilayah-wilayah yang maju secara merata untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah (Adisasmita, 2008).

Pembangunan wilayah memiliki peran krusial sebagai fondasi utama dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Melalui upaya pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, sebuah wilayah dapat mengalami transformasi positif secara menyeluruh. Tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rustiadi, dkk., (2011)

mendefinisikan pembangunan sebagai kegiatan yang dilakukan di suatu wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Hariyanto & Tukidi, (2007) pembangunan wilayah merupakan serangkaian upaya dan langkah yang diambil untuk mengoptimalkan potensi daerah, menghubungkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional, meningkatkan keharmonisan antar daerah, dan mengintegrasikan sektor-sektor pembangunan untuk mencapai sistem kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan dalam suatu wilayah memperhatikan beberapa indikator dalam menentukan tingkat perkembangannya yakni distribusi kependudukan dan tingkat aksesibilitas serta jumlah fasilitas sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Perkembangan suatu wilayah juga dipengaruhi oleh aspek-aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan aksesibilitas. Pemanfaatan setiap aspek harus dilakukan secara optimal untuk menentukan tingkat keberhasilan dari suatu pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan seringkali diukur melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita yang meningkat, peningkatan kualitas hidup, dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun, keberhasilan tersebut menyebabkan adanya variasi tingkat perkembangan antar wilayah sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap wilayah berbeda sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan masing-masing wilayah. Menurut Kuncoro (2011), jika suatu daerah mengedepankan pertumbuhan dalam pembangunan, akan timbul ketimpangan atau ketidakmerataan antar wilayah.

Pemahaman yang mendalam terhadap wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan suatu daerah guna menghindari terjadinya ketimpangan wilayah. Melalui pemahaman yang baik terhadap karakteristik, potensi, dan tantangan yang dimiliki oleh setiap wilayah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Djakapermana (2009) menyatakan bahwa dalam proses pembangunan daerah, penting untuk memahami karakteristik daerah terlebih dahulu. Pada dasarnya, wilayah bukan hanya suatu area dengan batas-batas tertentu. Sebaliknya wilayah merupakan suatu kawasan yang memiliki arti (*meaningful*) karena adanya permasalahan yang terjadi di dalamnya, sehingga menarik perhatian para ahli regional untuk menangani permasalahan tersebut, terutama karena berkaitan dengan masalah sosial-ekonomi (Muta'ali, 2011).

Pentingnya pemahaman terhadap karakteristik daerah ini menjadi relevan dalam upaya mencapai pembangunan wilayah yang optimal. Untuk itu, diperlukan penataan ruang yang lebih terintegrasi dan terarah agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi dan sinkronisasi pembangunan dalam pola tata ruang yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi krusial, termasuk dalam aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang, sebagai suatu sistem integral yang utuh. Proses ini harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, dan

berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang tertib, teratur, harmonis, dan seimbang.

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat perkembangan suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ketersediaan fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, aksesibilitas fasilitas-fasilitas tersebut juga turut mendukung berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya sektor ekonomi (Rustiadi, dkk., 2011). Adanya peningkatan ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 2.497,72 km². Kabupaten Deli Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1965. Berdasarkan ketentuan dalam PP No.7/1984, pusat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 1986. Dalam perkembangannya, Kabupaten Deli Serdang kemudian mengalami pemekaran menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan UU No.36/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2003. Secara administratif, Kabupaten Deli Serdang saat ini terdiri dari 22 Kecamatan, yang mencakup 380 Desa dan 14 Kelurahan.

Kabupaten Deli Serdang terletak di pesisir pantai Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Kabupaten ini juga merupakan salah satu kawasan strategis nasional MEBIDANGRO. Kondisi geografis ini menjadikan Kabupaten Deli Serdang sebagai lokasi yang strategis untuk kegiatan perdagangan dan industri. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang juga berbatasan langsung dengan Kota Medan, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, menjadikan Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah penyangga bagi Kota Medan.

Kabupaten Deli Serdang juga terletak di jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan jalan tol yang menghubungkan Kota Medan, Kota Binjai, dan Kota Tebing Tinggi, serta terhubung dengan jalur kereta api divisi regional 1 Sumatera Utara. Selain itu, Bandara Internasional Kualanamu juga terletak di kabupaten ini, menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit potensial untuk pengembangan industri. Fakta ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang, yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan mendominasi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebesar 30,59% pada tahun 2022.

Wilayah Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi SDA dan SDM yang melimpah, terutama dalam dimensi ekonomi yang terkait dengan industri dan perdagangan. Saat ini, wilayah yang memiliki potensi dan basis ekonomi di sektor industri dan perdagangan serta berbatasan langsung dengan Kota Medan, mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya ketersediaan fasilitas dan mobilitas penduduk yang tinggi. Di sisi lain, wilayah yang kurang

atau tidak memiliki potensi disektor industri dan perdagangan serta berjarak jauh dari pusat kota mengalami perkembangan wilayah yang terbatas. Menurut Muta'ali (2015), wilayah yang memiliki kedekatan lokasi dengan pusat-pusat perekonomian dan pemerintahan umumnya akan lebih terdorong untuk berkembang dan wilayah dengan lokasi strategis berpotensi menjadi penyangga bagi pusat wilayah.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Kabupaten Deli Serdang terhadap perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2022 berada di posisi kedua setelah Kota Medan, yakni mencapai 13,29%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Deli Serdang mengalami perkembangan yang lebih pesat daripada kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 1.953.986 jiwa, merupakan jumlah penduduk kedua terbanyak di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan. Jumlah penduduk yang besar tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang. Namun, jika dilihat dari perbandingan antar kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Deli Serdang, terlihat bahwa masih terdapat ketimpangan wilayah.

Ketimpangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Kecamatan Deli Tua memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebesar 6.402 jiwa/km². Kecamatan Lubuk Pakam, Sunggal, Percut Sei Tuan, Patumbak, Tanjung Morawa, Batang Kuis, dan Beringin juga memiliki

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu di atas 1.000 jiwa/km². Sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah, yaitu berkisar antara 42-765 jiwa/km².

Tabel 1. Kepadatan Penduduk Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Gunung Meriah	76,65	3.254	42
2	STM Hulu	223,38	13.652	61
3	Sibolangit	179,96	20.053	111
4	Kutalimbaru	174,92	36.450	208
5	Pancur Batu	122,53	94.172	796
6	Namo Rambe	62,3	39.871	640
7	Biru-Biru	89,69	39.546	441
8	STM Hilir	190,5	33.315	175
9	Bangun Purba	129,95	24.688	190
10	Galang	150,29	71.147	473
11	Tanjung Morawa	131,75	227.396	1.726
12	Patumbak	46,79	98.744	2.110
13	Deli Tua	9,36	59.923	6.402
14	Sunggal	92,52	243.785	2.635
15	Hamparan Perak	230,15	164.430	714
16	Labuhan Deli	127,23	67.806	533
17	Percut Sei Tuan	190,79	408.770	2.143
18	Batang Kuis	40,34	66.194	1.641
19	Pantai Labu	81,85	49.872	609
20	Beringin	52,69	61.773	1.172
21	Lubuk Pakam	31,19	89.161	2.859
22	Pagar Merbau	62,89	39.984	636

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Deli Serdang mencapai 782 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan Deli

Tua yaitu sebanyak 6.402 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk yang paling rendah berada di Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 42 jiwa/km² atau terpaut 6.360 jiwa/km². Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi penduduk di Kabupaten Deli Serdang tidak merata pada setiap kecamatan. Hal ini juga menunjukkan adanya konsentrasi jumlah penduduk yang tidak merata, dimana dari 22 kecamatan yang ada, hanya 8 kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk di atas 1.000 jiwa/km².

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya merupakan pusat kegiatan, seperti pusat pemerintahan, pusat perindustrian, dan pusat perdagangan. Pusat kegiatan tersebut didukung oleh faktor aksesibilitas yang mudah, seperti ketersediaan transportasi dan infrastruktur yang memadai. Perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa telah terjadinya konsentrasi penduduk ke arah pusat perkembangan wilayah atau pusat kota.

Tingginya kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat menyebabkan masalah seperti tingginya harga lahan dan keterbatasan lahan untuk sarana dan prasarana permukiman, pendidikan, serta kesehatan. Selain itu, tidak seimbangya kepadatan penduduk di Kabupaten Deli Serdang serta memiliki kondisi geografis yang luas dan terdiri dari wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan tidak meratanya penyebaran fasilitas seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terutama di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Ketidakmerataan fasilitas ini memicu ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Deli Serdang, di mana terdapat beberapa kecamatan memiliki

akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Lokasi Kota Medan yang berada ditengah Kabupaten Deli Serdang menyebabkan kecamatan-kecamatan yang dekat dengan pusat kota dan berbatasan langsung dengan Kota Medan memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator perkembangan wilayah, seperti tingkat kepadatan penduduk, jumlah fasilitas pelayanan, dan aksesibilitas.

Salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah dengan menganalisis tingkat perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan. Analisis ini penting dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan oleh pemerintah daerah. Analisis tingkat perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang sangat penting dilakukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Analisis ini dapat membantu pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi wilayah secara tepat. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya terkait dimensi pembangunan pada indikator perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan.

Pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kebijakan tersebut diterapkan dengan cara pembangunan daerah yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan tingkat

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di setiap wilayah, sehingga dapat mengurangi jarak pertumbuhan antar wilayah (Aswandi & Kuncoro, 2002). Wilayah yang memiliki tingkat perkembangan wilayah yang tinggi dengan fasilitas pelayanan dan dimensi pembangunan regional yang terpenuhi akan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ini dapat berperan dalam mendorong pembangunan di wilayah sekitarnya, mengurangi ketidakmerataan kepadatan penduduk, serta pemerataan fasilitas pelayanan pada setiap kecamatan.

Saat ini, belum ada identifikasi yang jelas mengenai kecamatan-kecamatan mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, analisis pusat pertumbuhan menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini dapat melihat wilayah mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan utama dan wilayah yang memiliki hirarki di bawahnya. Hasil dari analisis pusat pertumbuhan dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas dalam percepatan pembangunan sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Tingkat perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan adalah dua aspek penting dalam penelitian ini karena belum ada analisis yang komprehensif mengenai kedua aspek tersebut di Kabupaten Deli Serdang. Perkembangan wilayah akan membentuk pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dikarenakan wilayah yang memiliki potensi dan indikator-indikator perkembangan akan lebih cepat berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan. Penentuan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan akan

menghasilkan arahan kebijakan dalam mengoptimalkan potensi dan penyelesaian permasalahan wilayah di Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah dan potensi pusat pertumbuhan dengan unit analisis 22 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini mengacu pada beberapa indikator pembangunan wilayah, antara lain indikator Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ekonomi, Kelembagaan, Aksesibilitas dan Transportasi wilayah Kabupaten Deli Serdang. Analisis perkembangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang menggunakan data dua tahun yang berbeda yakni tahun 2019 dan tahun 2023 sedangkan untuk menganalisis pusat pertumbuhan menggunakan data tahun terakhir yaitu tahun 2023. Penentuan tahun didasarkan pada kontinuitas dan evaluasi program pembangunan, dengan rentang waktu yang sama dengan masa berlakunya RPJMD. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD selama 5 tahun telah terlaksana dan memberikan dampak terhadap tingkat perkembangan wilayah serta kecamatan mana yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang dan diperkuat dengan data-data pendukung menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan ini menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang tingkat perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan di Kabupaten

Deli Serdang dengan judul penelitian “**Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah dan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Terdapat ketimpangan perkembangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.
2. Terjadinya pemusatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di kecamatan yang dekat dengan pusat kota dan berbatasan langsung dengan Kota Medan.
3. Tidak meratanya penyebaran fasilitas antar kecamatan seperti sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terutama di kecamatan yang jauh dari pusat pelayanan.
4. Belum adanya identifikasi yang jelas mengenai kecamatan-kecamatan mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis membatasi cakupan penelitian pada tingkat perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan serta hubungannya di Kabupaten Deli Serdang. Pemilihan ruang lingkup ini dilakukan untuk mendalami secara lebih mendetail aspek-aspek terkait perkembangan wilayah dan pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 dan 2023?
2. Kecamatan mana yang memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana hubungan tingkat perkembangan wilayah dengan pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 dan 2023.
2. Mengetahui kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang.
3. Mengetahui hubungan tingkat perkembangan wilayah dengan pusat pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dalam bidang pembangunan wilayah, terutama terkait dengan analisis tingkat perkembangan wilayah dan identifikasi pusat pertumbuhan. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dengan studi-studi serupa.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat menjadi sumbangan dalam literatur yang membahas ketidakmerataan perkembangan wilayah.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah yang lebih tepat sasaran.
 - b. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan pengembangan infrastruktur.
 - c. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tingkat perkembangan wilayah, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
 - d. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai basis evaluasi kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang.